

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubau Post

Baubaupost.com

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

Selasa

23 September 2025

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Bertemu dengan Rombongan Rustini Muhaimin, Walikota Baubau HYF Bicara Soal BBM untuk Nelayan dan Alat Cuci Darah di RSUD Baubau untuk Pasien BPJS



Laporan: Ardi, Baubau Post, Durasi Times

BAUBAU, BP-Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE melakukan pertemuan dengan istri Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Rustini Muhaimin yang didampingi beberapa anggota DPR RI dari Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan serta Komisi XII yang membidangi sektor energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan investasi dari fraksi PKB di rujab Wali Kota Baubau Sabtu malam (13/09/2025).

Pada pertemuan yang diawali dengan jamuan makan malam tersebut, Wali Koa Baubau H Yusran Fahim, SE yang didampingi Pj Sekda Kota Baubau Drs Meizat Amril Tamim, M.Si dan Plt Asisten II Setda Kota Baubau dan pengurus

Lanjutkan ke Hal: 7

Pj Sekda Baubau Mz Amril Tamim Wakili Wali Kota Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD Atas Raperda Perubahan APBD 2025



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-DPRD Kota Baubau menggelar rapat paripurna terkait Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD

TA 2025 dan Tanggapan Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD berkenaan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Kota Baubau, Selasa (16/09/2025).

Rapat paripurna ini dip-

impin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Baubau I Natas Aryu Prawira Tamim, SM, MM didampingi Wakil Ketua II Adriansyah Farmin, ST serta dihadiri para Anggota DPRD Kota Bau-

Lanjutkan ke Hal: 7

Sekda Sultra Asrun Lio Buka Training Centre STQH Nasional XXVIII Tahun 2025

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'ân (LPTQ) Provinsi Sultra, secara resmi mewakili Gubernur Sultra,



Lanjutkan ke Hal: 7

Wali Kota Baubau H TYusran Resmikan PLUT KUMKM untuk Majukan UMKM



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE Resmikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kamis (18/09/2025).

PLUT UMKM adalah unit teknis yang memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha koperasi, UMKM, dan wirausaha. Dalam sambutannya, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE

mengungkapkan, Kota Baubau adalah daerah persinggahan karena terletak pada jalur pelayaran yang menghubungkan Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia, serta sebagai daerah

Lanjutkan ke Hal: 7

Dorong Pertumbuhan Industri Kreatif, Baubau Segera Bentuk KEK



Laporan: Rahim

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melalui Dinas

Pariwisata Kota Baubau tengah mempersiapkan Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif (KEK). Plh Asisten II Setda Kota

Baubau Moh Abduh, STP, M.Si saat pembentukan komite ekonomi

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Bertemu dengan Rombongan Rustini Muhaimin, Walikota Baubau HYF Bicara Soal BBM untuk Nelayan dan Alat Cuci Darah di RSUD Baubau untuk Pasien BPJS

BKMT, menyampaikan beberapa hal diantaranya persoalan BPJS dan BBM. Dan untuk persoalan BPJS di Kota Baubau untuk layanannya terhadap pasien di RSUD Baubau belum sepenuhnya maksimal. Kemudian juga dibicarakan terkait dengan pelayanan cuci darah di RSUD Baubau untuk kemajuan pelayanan

Kesehatan di Kota Baubau.

"Alhamdulillah, kami sudah dihubungkan langsung dengan direktur BPJS dan beliau sudah menjamin bahwa sesegera mungkin itu akan terlaksana," ujarnya.

Sedangkan soal BBM, H Yusran Fahim, SE berharap kepada anggota komisi XII yang mendampingi is-

tri Cak Imin untuk membantu petani dan nelayan di Kota Baubau agar mendapatkan jatah BBMnya yang sama dengan masyarakat lainnya sehingga berdampak lebih baik lagi ke depannya. Dan ini juga mendapatkan tanggapan yang cukup positif dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, rencananya pada Minggu

pagi (14/09/2025) istri Cak Imin Rustini dan beberapa anggota DPR RI dari fraksi PKB akan mengadakan kegiatan pertemuan pendidikan kader perempuan bangsa dan bakti sosial berupa pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, Lansia serta UMKM di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata. (*)

Sekda Sultra Asrun Lio Buka Training Centre STQH Nasional XXVIII Tahun 2025

Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangeruka (ASR), dalam acara pembukaan Training Centre peserta Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadis (STQH) Nasional ke-28 Tahun 2025, yang berlangsung di Kota Kendari, Minggu (21/9/2025).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sultra atau mewakili, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pimpinan ormas keagamaan Islam se-Sultra yang sempat hadir.

Turut hadir pula para pelatih nasional, seperti Dr. Hj. Maria Ulfa, MA, Dr. H. Ahmad Fudhaili, Rahmat Batubara, SQ, KH. Syam Amir, SQ, para pelatih daerah, panitia penyelenggara, serta seluruh peserta pelatihan STQH nasional utusan Sultra.

Dalam sambutan Gubernur ASR, Sekda menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian penting dari ikhtiar kolektif dalam mempersiapkan kafilah Provinsi Sultra agar mampu meraih prestasi terbaik dalam ajang STQH tingkat nasional.

"Pelatihan ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi pembinaan yang mencakup penguatan aspek teknik membaca, menghafal, menafsirkan Al-Qur'an, serta pemahaman hadis. Lebih dari itu, kegiatan ini juga bertujuan membentuk karakter peserta yang disiplin, bermental tangguh, serta menjunjung tinggi ukhawah Islamiyah," ungkap Sekda.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para pelatih nasional yang telah hadir memberikan pembekalan, serta para pelatih daerah yang diharapkan terus mendampingi peser-

ta dengan penuh dedikasi.

"Kepada seluruh peserta, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Belajarlah dengan penuh semangat, berlatih dengan disiplin, dan bertandilah dengan sportivitas. Insyaa Allah, upaya kalian akan menjadi amal jariyah yang berbuah kebaikan di dunia dan akhirat," pesannya.

Menyiapkan Generasi Qur'ani yang tangguh lebih lanjut, Gubernur ASR melalui Sekda Sultra menegaskan pentingnya menjadikan STQH sebagai sarana membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual.

"Mari kita jadikan STQH ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan menumbuhkan generasi muda yang tangguh, berakhlak Qur'ani, dan siap

menghadapi tantangan zaman. Generasi seperti inilah yang akan menjadi pilar bangsa di masa depan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan STQH sebagai momentum memperkuat kecintaan terhadap Al-Qur'an dan Hadis, serta mengokohkan budaya literasi Qur'ani di tengah masyarakat.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Training Centre peserta Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Hadis (STQH) tingkat nasional ke-28 Tahun 2025, saya nyatakan secara resmi dibuka," ucap Sekda mewakili Gubernur ASR.

Acara pembukaan ini juga menjadi penanda dimulainya rangkaian pelatihan intensif bagi para peserta yang akan mewakili Sultra dalam STQH Nasional yang juga akan digelar di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun ini. (*)

Pj Sekda Baubau Mz Amril Tamim Wakili Wali Kota Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD Atas Raperda Perubahan APBD 2025

Hadir dalam rapat paripurna itu, Pj Sekda Kota Baubau Drs Meizat Amril Tamim, M.Si dan jajaran pimpinan OPD.

Wali Kota Baubau yang diwakili Pj Sekda Kota Baubau Drs Meizat Amril Tamim, M.Si dalam sambutannya mengungkapkan, Pemerintah mencermati secara seksama dan mendalami semua yang disampaikan oleh seluruh Fraksi DPRD melalui pandangan umum Fraksi, baik itu berupa pandangan, dukungan dan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Baubau dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta saran-saran, usul dan harapan agar pemerintah daerah bekerja lebih baik.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Baubau menyam-

paikan terima kasih pada seluruh Fraksi DPRD Kota Baubau atas pandangan terhadap berbagai substansi yang tertuang dalam Raperda tentang Perubahan APBD Kota Baubau Tahun Anggaran 2025, yang telah disampaikan oleh Walikota Baubau tanggal 15 September 2025.

Tentu merupakan masukan yang sangat berharga, dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut untuk penyempurnaan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Atas nama Pemerintah daerah, menyambut baik persetujuan dewan yang terhormat untuk bersama-sama membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Baubau Tahun Anggaran 2025 secara lebih mendalam, detail, akurat, dan cermat sehingga kewajiban dan amanah mulia yang diberikan oleh rakyat dan

masyarakat Kota Baubau kepada kita semua untuk bekerja sebaik mungkin dapat diselesaikan secara tepat waktu," ujarnya.

Ditambahkan, APBD merupakan penjabaran rencana kerja untuk program dan kegiatan anggaran di dalam upaya mencapai sasaran pembangunan dalam satu tahun. APBD mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sehingga, APBD harus dikelola dengan baik karena merupakan instrumen utama untuk mencapai tujuan bangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Dorong Pertumbuhan Industri Kreatif, Baubau Segera Bentuk KEK

kreatif Kota Baubau tahun 2025 di Hotel Mira Kamis, (11/09/2025) mengungkapkan, perkembangan ekonomi kreatif sangat luas dan banyak sekali sub sektor seperti desain grafis, koreografi, tari-tarian, fotografer, kuliner yang perlu diwadahi. Dan diharapkan kedepan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurut Moh Abduh, KEK perlu dibentuk atau disiapkan untuk mendorong Kota Baubau menjadi Kota Ekonomi Kreatif yang didukung oleh iklim investasi.

Sementara itu, Kadis Pariwisata Dr.H.Idrus Taufik Saidi, S.Kom.,M.Si menjelaskan, ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah bersinergi dengan Asta cita untuk peningkatan lapangan kerja,nilai tambah, pemerataan ekonomi, dengan berbagai Industri kre-

atif dalam budaya,desain,digital teknologi dan media.

Dalam data sebaran Kabupaten/ Kota Sultra, Kota Baubau menjadi salah satu prioritas ekonomi kreatif dalam seni pertunjukan dan kuliner. Dan secara pertunjukan, Kota Baubau lewat Dinas Pariwisata beberapa kali menyabet juara di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga mendorong pembentukan KEK Kota Baubau dan perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Baubau Tahun 2025.

Pada kesempatan tersebut, Sekdin Kominfo Kota Baubau Dr.Hamzah Palalloi, .M.Ikom di dapat selaku moderator pada sesi pertanyaan dan diskusi. Turut hadir dari Dinas Pariwisata, Disnaker, Kominfo,Bappeda,Perindag, Um Buton, Unidayan, UMKM, Duta Wisata, GORA, BBCF. Yayasan Kesenian La Ode Umuri Bolu, Forcella Band dan Pelaku Ekraf Kota Baubau. (*)

Wali Kota Baubau H TYusran Resmikan PLUT KUMKM untuk Majukan UMKM

penyangga. Karunia ini, telah mendudukan Baubau untuk berperan sebagai kota jasa dan kota dagang.

Dikatakan, Pemerintah Kota Baubau sangat menyadari besarnya potensi UMKM, termasuk kontribusinya pada PDRB, maupun peranannya dalam penyerapan tenaga kerja. Tetapi, harus diakui pekerjaan rumah

masih banyak dalam memajukan UMKM karena mayoritas dari mereka masih berskala usaha mikro. Selain itu, rasio wirausaha Kota Baubau minimal 4% dari jumlah angkatan kerja sebagai salah satu prasyarat daerah maju, dalam tiga tahun terakhir rata-rata hanya 3,82%.

H Yusran Fahim berharap sesuai misinya, pusat layanan usaha terpadu harus men-

jadi pusat penyelesaian masalah, pusat rujukan, dan pusat praktik terbaik bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha akan memampukan koperasi dan UMKM dalam membangun produk-produk hasil karya yang berkualitas yang dibuat, dikelola, dijual, dan dipasarkan sendiri. Dengan demikian, potensi koperasi sebagai badan usaha yang paling sesuai dengan Pasal 33

ayat (1) UUD Tahun 1945 dalam mewujudkan kemakmuran rakyat dan UMKM yang kuat akan menjadi sumber kekuatan dalam memenangkan persaingan ekonomi dapat kita capai.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini menghimbau kepada koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk memanfaatkan layanan usaha terpadu ini dengan sebaik-baiknya, seperti: konsultasi dan

pendampingan usaha, pendaftaran usaha secara elektronik, pelatihan teknis dan manajerial, standarisasi produk, pengembangan kemasan produk, promosi dan pemasaran produk, inkubasi bisnis, serta kurasi produk UMKM.

Sementara itu, Kadis Koperasi dan UMKM Kota Baubau Aliman, SE melaporkan, gedung PLUT KUMKM Kota Baubau dibangun pada Tahun Anggaran

2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan anggaran sebesar Rp5.430.105.367,00. Gedung ini juga dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan pelatihan dan pendampingan untuk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebesar Rp2.334.520.010,00.

Gedung ini dikonstruksi 2 (dua) lantai. Pada Lantai 1 terdapat 13 ruangan: Ruang Inkubator Kuliner, Ruang Kemasan, Ruang Idea Private, Ruang Multimedia dan Podcast, Lobby, Area Open Space, Ruang Gallery Produk, Ruang Gudang, Coworking space, Musholla, Tailer, Kantin, dan Ruang Laktasi. (*)

Walikota Baubau HYF dan DPRD Tandantangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS APBD Kota Baubau TA 2025



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-DPRD Kota Baubau menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Baubau Tahun Anggaran (TA) 2025, Senin (15/09/2025).

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufri, ST, didampingi Wakil Ketua, Natas Aryu Prawira Tamim, SM, MM dan Adriansyah Farmin, ST serta dihadiri Anggota DPRD Kota Baubau, Forkompinda, Pj Sekda Kota Baubau dan kepala OPD.

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim,

SE dalam sambutannya menyampaikan, APBD merupakan dokumen anggaran yang bersifat dinamis dan fleksibel, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perekonomian daerah guna menyalurkan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun anggaran dimungkinkan untuk menyusun APBD lebih dari satu kali atau melakukan perubahan APBD guna menampung dinamika faktor eksternal maupun faktor internal yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekonomi makro yang telah ditetapkan sebelumnya dalam

APBD Induk.

Dikatakan, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 928,95 milyar terkoreksi berkurang sebesar Rp 37,61 milyar atau 3,89 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum perubahan Tahun Anggaran 2025 yakni sebesar Rp 966,56 milyar, total APBD tersebut merupakan penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan daerah.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Perubahan Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 898,51 milyar berkurang sebesar Rp 51,05 miliar atau 5,38 persen dari Pendapatan APBD Sebelum Perubahan Tahun

Anggaran 2025 sebesar Rp 949,56 miliar

Rancangan perubahan pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 142 milyar, Pendapatan Transfer Daerah sebesar Rp 741,99 milyar dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 14,52 milyar.

H Yusran Fahim berharap, penjelasan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS APBD Kota Baubau TA 2025 dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat Fraksi dan Komisi, sehingga dewan dapat mempertimbangkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini, untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah. (*)

Panglima TNI soal Anggaran Jumbo Kemhan: Investor Masuk Tak Terganggu



Laporan: Listar

JAKARTA-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa senjata pertahanan canggih memiliki harga yang mahal sehingga Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI disetujui mendapatkan anggaran Rp187,1 triliun pada tahun 2026 oleh DPR RI.

"Karena senjata yang canggih itu mahal. Sangat mahal," katanya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu.

Agus mengatakan, dengan anggaran pertahanan yang besar, TNI akan bisa menjaga kedaulatan negara sehingga masyarakat bisa hidup dengan nyaman dan aman.

"Investor juga bisa masuk ke negara kita tanpa terganggu," imbuhnya.

Agus juga mengungkapkan bahwa negara lain memiliki anggaran pertahanan yang lebih besar.

"Di negara-negara lain itu anggaran pertahanannya lebih besar. Contohnya Pakistan. Pertahanan di negara-negara lain besar sehingga ten-

tara khususnya bisa mengamankan wilayahnya, bisa mengamankan masyarakat," ucapnya.

Pada Selasa (16/9), Komisi I DPR RI menyetujui jumlah anggaran yang diajukan Kemhan untuk tahun 2026 sebesar Rp 187,1 triliun.

"Proposal akhir dari anggaran Kemhan dan TNI tahun 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi I untuk dibawa ke Badan Anggaran, sejumlah Rp 187,1 triliun," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Sjafrie menjelaskan, anggaran itu akan digunakan Kemhan untuk menggaji pegawai dan prajurit TNI, memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, dan memperkuat sektor-sektor pertahanan lain yang berkaitan dengan kedaulatan negara.

Sjafrie memastikan serapan anggaran akan dilakukan secara maksimal agar dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Karenanya, dia meminta seluruh kepala staf angkatan untuk serius dalam menggunakan anggaran secara efektif namun dengan hasil yang maksimal.

"Para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target trisula perisai nusantara," jelas Sjafrie. (*)

Anggota DPR Pertanyakan Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN

Laporan: Hasim

JAKARTA-Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mempertanyakan frasa 'Ibu Kota Politik' dalam Perpres No 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah terkait rencana pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

"Di UU IKN spirit yang kita tangkap menjelaskan fungsi pusat pemerintahan sebagaimana terdapat di Pasal 12 ayat (1) UU No 21 Tahun 2023 tentang IKN. Tidak ada sama sekali menyebut frasa 'Ibu Kota Politik,'" kata Khozin di Jakarta, Sabtu (20/9).

Khozin pun meminta pemerintah menjelaskan mengenai perubahan frasa 'Ibu Kota Politik' dalam lampiran di Perpres No 79 Tahun 2025.

Perpres No 79 Tahun 2025 ini sekaligus merevisi aturan sebelumnya yakni Perpres No 109 Tahun 2024



tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Menurut dia, penyebutan Ibu Kota Politik perlu diperjelas apakah perubahan frasa ini dapat diartikan secara definitif pindah ibu kota negara atau sekadar penyebutan semata.

"Apakah Ibu Kota Politik sama dengan ibu kota negara? Ketika Ibu Kota Politik dimaknai sama dengan Ibu Kota Negara, maka ada konsekuensi politik dan hukum," ujarnya.

Dia menguraikan,

Pasal 39 (1) UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN, perpindahan ibu kota negara diwujudkan dengan penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara.

"Implikasi politik dan hukum akan muncul ketika Ibu Kota Negara secara definitif pindah dari Jakarta ke IKN," tuturnya.

Menurut Khozin, jika Ibu Kota Politik dimaknai sebagai Ibu Kota Negara, maka keputusan ini harus menjadi agenda bersama seluruh cabang

kekuasaan negara, termasuk lembaga-lembaga di luar negara, dan lembaga internasional yang berada di Indonesia.

"Ketika Ibu Kota Negara definitif berpindah ke IKN, maka ada konsekuensi yang harus disiapkan dari sekarang, tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh lembaga di luar pemerintah termasuk lembaga internasional yang berada di Indonesia," kata Khozin.

Namun, kata Khozin, jika yang dimaksud Ibu Kota Politik merupakan

pusat pemerintahan sebagaimana tertuang dalam UU IKN, sebaiknya tak perlu membuat istilah baru yang justru potensial menimbulkan pertanyaan publik.

"Jika yang dimaksud ibu kota politik itu tak lain adalah pusat pemerintahan, sebaiknya tak perlu buat istilah baru yang menimbulkan tanya di publik," tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang di dalamnya membahas rencana pembangunan kawasan IKN sebagai ibu kota politik di 2028.

Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Pemerintah Tahun 2025 memuat tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Kemudian pada

Highlight Intervensi Kebijakan, terdapat serangkaian intervensi termasuk pemindahan ibu kota ke IKN.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028...," demikian yang tertulis dalam Perpres.

Dalam penjelasan Perpres, IKN disebutkan luas area kawasan inti pusat dan sekitarnya mencapai 800-850 hektar. Kemudian persentase pembangunan gedung atau perkantoran mencapai 20 persen.

Selain itu, persentase pembangunan hunian atau rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan IKN mencapai 50 persen.

Dalam Perpres juga dijabarkan soal pemindahan dan atau penguasaan ASN ke IKN. Total sekitar 1.700-4.100 orang ASN yang bakal ditugaskan di sana.

Demi mendukung

penyelenggaraan pemerintahan di sana, dibangun rumah baru sebanyak 476 unit, kemudian ada sebanyak 38.504 unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya.

Pembangunan IKN sudah dimulai sejak 2022 atau era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi, sapaan akrabnya, menyampaikan pembangunan IKN didasari semangat pemerataan di Indonesia. Ia ingin pembangunan tidak lagi Jawasentris, tetapi Indonesiasentris.

"Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan pemerataan pembangunan sehingga tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris," kata Jokowi dalam acara itu yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (22/2).

Dia menambahkan proses pembangunan bisa rampung dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan. Saat selesai, Jokowi menyebut IKN bakal jadi kota pemerintahan. (*)

Wagub Sultra Hugua Pimpin Apel Sore di Dishub, Tekankan Disiplin dan Pelayanan Transportasi



Pewartu: Mashuri

SULTRA, BP- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., memimpin apel sore secara acak di Dinas Perhubungan, Kamis (18/9/2025). Sidak kedisiplinan yang dilaksanakan pukul 16.00 WITA ini diawali dengan apel sore yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur di halaman Dishub Sultra.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; Asisten Administrasi Umum; serta Kepala Dinas Perhubungan Sultra.

Dalam arahnya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa kunjungan apel secara acak ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sultra dalam membangun budaya disiplin di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sebagaimana yang saya sampaikan, apel acak ini bukan sidak formal, melainkan cara kita memastikan bahwa kedisiplinan menjadi bagian dari pola hidup ASN. Saya pun tidak tahu di mana akan memimpin apel sore, baru ditentu-

kan sesaat sebelumnya. Dan sore ini kita berada di Dinas Perhubungan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wagub Hugua menyinggung pentingnya peran insan perhubungan dalam memberikan pelayanan transportasi yang humanis, aman, dan nyaman kepada masyarakat. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan sumpah dan janji insan perhubungan yang diingatkan pada Hari Perhubungan Nasional. “Saya teringat dengan sumpah itu, yang mengajarkan kita untuk menghadirkan pelayanan transportasi yang gagah, tegas, mantap, aman dan nyaman. Maka, mulai dari lampu lalu lintas, pelayanan lalu lintas, hingga kedisiplinan petugas harus dicek,” katanya.

Selain menekankan kedisiplinan, Wagub juga mengingatkan agar Dinas Perhubungan dapat merencanakan kawasan bebas rokok di fasilitas-fasilitas publik.

Menurutnya, hal ini perlu dipertegas dalam APBD serta disosialisasikan secara konsisten. “Harus ada ketertiban kawasan bebas rokok. Tidak semua orang yang tidak merokok harus membagi nikotin orang lain. Maka perlu disiapkan ruangan

khusus merokok, termasuk di kapal-kapal yang berada di bawah kewenangan kita. Dulu pernah dilaksanakan, tapi belakangan mengendur. Ini harus kita hidupkan kembali,” tegasnya.

Wagub Hugua juga meminta agar langkah tersebut diperkuat dengan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda). “Kalau ini menjadi Perda, maka ketertiban bisa berjalan lebih baik. Sosialisasi harus terus dilakukan agar kesadaran menjadi budaya,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan bahwa setiap kegiatan pemerintah harus diawali dengan doa. “Kita menciptakan nasib diawali dengan doa. Setiap pagi kita bekerja dengan rahmat Allah, dan sore kita akhiri dengan doa. Tidak akan pernah bisa kita sukses tanpa doa,” ujarnya.

Terkait kedisiplinan ASN, Wagub menyampaikan apresiasi atas tingkat kehadiran pegawai Dinas Perhubungan yang dinilainya cukup baik. Dari total 107 pegawai, tercatat 89 orang hadir, sementara 2 orang sedang bertugas di luar, 2 orang sakit, dan 1 orang izin. “Hari ini, kehad-

iran mencapai 90%. Artinya cukup sukses, menandakan ASN Sultra mulai sadar bahwa disiplin itu lifestyle, pola hidup. Saya harap OPD lain juga dapat menjadikan Dinas Perhubungan sebagai rujukan,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kedisiplinan tidak hanya terkait kehadiran, tetapi juga mencerminkan nilai keagamaan, apalagi jelang pelaksanaan STQH (Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits). “Kedisiplinan adalah bagian dari nuansa keagamaan. Sebagai insan transportasi, kita harus menjadi teladan di jalan, menata koordinasi dengan kepolisian dan aparat terkait agar pelayanan publik benar-benar maksimal,” imbuhnya.

Menutup arahnya, Wakil Gubernur berharap budaya disiplin dan pelayanan transportasi humanis dapat terus ditanamkan dan dilaksanakan oleh seluruh ASN, khususnya insan perhubungan. “Kalau kedisiplinan sudah membudaya, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita semua,” pungkasnya. (*)

Plt. Inspektur Sultra Pimpin Rapat Pembahasan MCSP KPK dan Optimalisasi Pajak Daerah 2025



Pewartu: Lisna

SULTRA, BP- Plt. Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Intan Nurcahya, memimpin Rapat Pembahasan Indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Tahun 2025, khususnya pada Area Perencanaan dan Area Optimalisasi Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Inspekturat Provinsi Sultra, Kamis (18/9/2025).

Rapat dihadiri perwakilan OPD lingkungan Pemprov Sultra, di antaranya Inspektur Pembantu IV (Urban Investasi), Bappeda Sultra, Setwan DPRD Sultra, BPKAD (Bidang Anggaran), Bapenda, Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Dinas SDA dan Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dispora, Dinas Kesehatan, Disperindag, DKP, Dinas Kominfo, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra, termasuk admin OPD MCSP.

Dalam arahnya, Dr. Intan menjelaskan posisi MCSP Sultra saat ini berada di peringkat 25 dari 546 pemerintah daerah se-Indonesia. Capaian ini menunjukkan gambaran komitmen Sultra dalam pencegahan

korupsi di mata KPK dan pemerintah pusat.

“MCSP ini sebenarnya adalah gambaran bagaimana KPK melihat Sultra. Untuk itu, kita harus serius dalam pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi bagian penting dari indikator MCSP,” jelasnya.

Ia menegaskan, hingga saat ini capaian pengisian SPI internal ASN Sultra sudah mencapai 77,9 persen dari total 1.076 responden. Namun, masih terdapat kendala pada pengisian eksternal atau vendor/pengguna layanan, di mana dari target 421 baru sekitar 300-an yang menyelesaikan survei.

Menurutnya, masih ada keraguan sebagian ASN maupun mitra eksternal dalam mengisi SPI karena khawatir data mereka akan disalahgunakan. Padahal, KPK menjamin penuh kerahasiaan data responden.

“Seperti yang disampaikan Bapak Gubernur pada apel gabungan, jangan takut. Kerahasiaan Bapak Ibu dijaga KPK. Jadi mari bantu agar target pengisian bisa tercapai,” tegasnya.

Dr. Intan juga mengingatkan OPD untuk aktif mendorong seluruh pegawai, kepala bidang, hingga vendor agar tidak melewatkan kesempatan mengisi survei. Jika pesan WhatsApp dari KPK tidak ditanggapi sebanyak tiga kali, maka data akan otomatis hangus dan peluang provinsi untuk mendapatkan skor lebih tinggi menjadi hilang.

Selain MCSP, rapat juga membahas tata kelola hibah yang

menjadi perhatian serius KPK. Dr. Intan menekankan bahwa pengajuan hibah tidak boleh dilakukan mendadak di tahun anggaran berjalan, melainkan harus masuk dalam perencanaan tahun sebelumnya.

“Hibah itu tidak bisa tiba-tiba muncul di tahun berjalan. Prosesnya harus melalui verifikasi oleh OPD sebelum masuk pembahasan anggaran. Jadi sejak awal perencanaan sudah harus masuk dan diverifikasi,” jelasnya.

Ia mencontohkan, kesalahan umum yang sering terjadi adalah proposal hibah baru dimasukkan ketika pembahasan anggaran sedang berlangsung. Hal ini bertentangan dengan aturan dan berpotensi menurunkan nilai integritas daerah. Lebih lanjut, Dr. Intan menegaskan bahwa hibah yang diprioritaskan adalah untuk kepentingan masyarakat, khususnya sarana dan prasarana yang benar-benar dibutuhkan, bukan untuk lembaga tertentu.

“Saya sampaikan di forum ini, tolong ingatkan pimpinan bahwa hibah itu aturannya harus diusulkan satu tahun sebelum kegiatan berjalan, karena fokus KPK ada pada hibah. Kalau ada hibah, segera bentuk tim dengan SK verifikasi supaya proses verifikasi bisa dilakukan lebih awal dan kita tidak dikejar waktu,” tegasnya.

Menutup arahnya, Dr. Intan mengajak seluruh OPD agar bersinergi mendukung pencapaian target MCSP dan tata kelola hibah yang transparan. Ia menegaskan, keberhasilan pencapaian ini bukan hanya tanggung jawab Inspekturat, melainkan kerja kolektif seluruh perangkat daerah. *IKP*

Wakil Bupati Rahman Hadiri Rapat Paripurna DPRD Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Buton Utara Tahun 2025



Laporan : Kasrun

BUTUR, BP-Wakil Bupati Buton Utara Rahman, SKM., M. Kes. menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Utara dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya dibahas bersama di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Utara, Jum'at (12/9/2025). Sebagaimana diketahui, pada tahun ini Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan Efisiensi Anggaran Nasional sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal negara. Dengan adanya kebijakan ini secara otomatis berimplikasi pada penyesuaian dana transfer ke daerah, termasuk untuk Kabupaten Buton Utara. Berdasarkan hal tersebut, Wakil Bupati Rahman dalam sambutannya mengatakan bahwa Efisiensi Anggaran bukanlah sekadar pembatasan, melainkan kesempatan bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja

daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Secara garis besar, Rancangan Pokok-pokok KUA dan PPAS Atas Perubahan APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025 Sebagai Berikut: Pendapatan Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp916.579.710.399,- mengalami penurunan sebesar Rp76.507.343.773,- sehingga menjadi Rp840.072.366.626,-. Penurunan ini merupakan konsekuensi dari dinamika fiskal nasional, khususnya adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada dana penyesuaian transfer ke daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula ditargetkan sebesar Rp27.110.685.523,- meningkat sebesar Rp3.101.997.161,- sehingga menjadi Rp30.212.682.684,- bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Semula Ditargetkan Sebesar Rp882.759.742.386,- mengalami penurunan sebesar Rp80.175.729.534,- sehingga menjadi Rp802.584.012.852,- yang bersumber dari Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Khusus, Dana Desa, serta Insentif Fiskal. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula ditargetkan sebesar Rp14.325.564.386,- mengalami kenaikan sebesar Rp4.929.174.658,- sehingga menjadi Rp19.254.739.044,-. Belanja Daerah Semula Ditargetkan Sebesar Rp922.925.112.111,- menjadi Rp831.221.385.325,24 Menurun Sebesar 91.703.726.785,76. Penerimaan Pembiayaan Diproyeksikan Mengalami Penurunan Sebesar Rp15.996.383.012,76 dari target semula sebesar Rp30.937.021.000,- Ribu Rupiah, sehingga menjadi Rp14.940.637.987,24. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21.B/LHP/XIX.KDR/05/2025 Tanggal 22 Mei 2025 Atas LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2024. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan

aan yang semula ditargetkan sebesar Rp24.591.619.288,- berkurang sebesar Rp800.000.000,- sehingga menjadi Rp23.791.619.288,- yang dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan KUA dan PPAS Atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut merupakan angka proyeksi yang bersifat sementara, yang dimungkinkan akan terjadi penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maupun akibat adanya kebijakan Nasional yang bersifat mendesak dan ditetapkan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD. Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Bupati Rahman mengatakan Perubahan KUA dan PPAS Ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan APBD Perubahan Tahun 2025 benar-benar mencerminkan kondisi fiskal yang riil, menjamin keberlanjutan layanan publik, serta meningkatkan kualitas Belanja Daerah di tengah kebijakan efisiensi Nasional. "Untuk itu, saya sangat mengharapkan dukungan penuh dan masukan konstruktif dari Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga pembahasan yang akan kita laksanakan bersama dapat menghasilkan keputusan yang kokoh, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Buton Utara. Semoga keputusan yang kita ambil bersama senantiasa membawa maslahat bagi daerah dan rakyat Buton Utara," pungkasnya. Hadir pada Rapat Paripurna, Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara, para Staf Ahli, para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara, serta para Kepala OPD Lingkup Pemda Buton Utara. (*)

Ketua TP-PKK Butur Hadiri Rakornas Posyandu 2025 di Jakarta

Laporan : Kasrun

BUTUR, BP-Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-

PKK), selaku Ketua Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Buton Utara (Butur), Suhaemi Sudia Afirudin, S.Pd., bersama Kepala Dinas Pemanfaatan Masyarakat dan Desa (DPMD) Butur, Mohammad Amaluddin Mokhram,

S.S., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2025, Senin (22/9/2025). Rakornas Posyandu

Pemkab Buton Tengah Gelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H



BUTENG, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Masjid Agung Nurul Huda KH. Abdul Syukur, Lakudo, Selasa (9/9/2025). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, bersama jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD Buteng, forkopimda, jajaran Kementerian Agama, para asisten, staf ahli, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Turut hadir pula para kepala OPD, kepala bagian, camat, Ketua MUI Buteng, Ketua Baznas, Danramil 1413-08 GU, kepala KUA, TP-PKK,

Dharma Wanita, serta Ketua BKMT beserta anggota. Mengangkat tema "Meneladani Nabi Muhammad SAW dalam membangun Ukuwah Islamiyah menuju Kota Santri dan Kota Pendidikan mewujudkan Buton Tengah yang sejahtera". Peringatan Maulid Nabi Muhammad ini juga menghadirkan penceramah Dr. H. Rahmad Haniru, Lc., M.HI., yang mengajak jamaah meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah, di antaranya kasih sayang, kesabaran, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momen-

tum mempererat tali silaturahmi dan ukuwah Islamiyah. Ia juga berharap kegiatan serupa ke depan dapat dilaksanakan lebih meriah. "Kegiatan Maulid Nabi ini bukan hanya sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah, tetapi juga menjadi sarana memperkokoh persaudaraan umat. Insya Allah tahun depan kita akan buat lebih semarak lagi dengan menghadirkan ustaz-ustaz terbaik untuk memberikan tausiah," ujar Bupati Azhari. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap ajaran Islam sekaligus memperkokoh persaudaraan di Kabupaten Buton Tengah.(R)



digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tersebut, bertempat di Krakatau Ballroom Mercure Convention Center Ancol Jakarta Utara, dengan mengusung tema "Penguatan Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat". Rakornas bersama Ketua TP Posyandu Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia tersebut dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan Posyandu, sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang berperan memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Dalam keterangannya, Kepala DPMD Butur Amaluddin Mokhram, menyampaikan, bahwa terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Posyandu saat ini, seiring berlakunya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Menurutnya, Jika sebelumnya cakupan pelayanan posyandu menitik beratkan pada aspek kesehatan dasar saja, maka saat ini berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, cakupan pelayanannya meliputi 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal (SPM)

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Kewenangan Wajib Pemerintah. "Program ini benar-benar substansial, menjadi kebutuhan masyarakat desa terutama mengenai pelayanan dasar masyarakat dari pemerintah sangat mereka butuhkan, diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, sosial, PUPR, permukiman, serta perumahan rakyat dan Ketertiban Umum Masyarakat". Ungkap Amaluddin. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Penasehat TP Posyandu Pusat dalam keynote speechnya menyampaikan Arah Kebijakan Kemendagri Dalam Implementasi Penyelenggaraan Posyandu Terhadap 6 (enam) Bidang SPM Guna Mendukung Program Prioritas Presiden. Sementara itu Ketua TP Posyandu Pusat Ibu Tri Suswati Karnavian dalam arahnya lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi TP Posyandu Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas posyandu melalui sinergitas bersama Dinas/Badan Pengampu SPM di daerah, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Sat Pol PP, BPBD, dan Dinas Damkar. (*)

Yusran-Hamsinah Hadirkan Universitas Negeri Pertama di Baubau



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Untuk pertama kalinya di Kota Baubau hadir Universitas Negeri yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari- kampus Baubau yang pada Kamis (18/09/2025), Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE telah melakukan Soft Launching Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari-Kampus Baubau di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata.

Menurut Wali Kota Baubau Yusran Fahim, kehadiran IAIN Kendari kampus Baubau saat ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Baubau dan

gan IAIN Kendari pada 31 Juli 2025 lalu. Kerja sama ini menjadi wujud nyata komitmen untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah kepulauan.

Orang nomor satu di Kota Baubau juga memahami bagi bahwa hadirnya kampus baru akan membawa manfaat berganda pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran dosen, mahasiswa, dan aktivitas akademik akan mendorong berkembangnya sektor perdagangan, perumahan, jasa, transportasi, serta usaha kecil menengah di sekitar kawasan kampus, dengan demikian, iain kampus baubau bukan hanya pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi

juga menjadi loko- motif baru penggerak ekonomi lokal.

H Yusran Fahim menyambut baik rencana transformasi Universitas Kendari IAIN Islam menjadi negeri (UIN). Transformasi ini akan memiliki dampak yang luas, bukan hanya pada pengembangan pendidikan keagamaan, tetapi juga pada berbagai disiplin ilmu universal lainnya seperti sains, teknologi, sosial, dan humaniora. Kehadiran uin di Sulawesi Tenggara, termasuk melalui kampus di baubau, akan membuka ruang baru bagi generasi muda kepulauan buton untuk mengakses pendidikan tinggi yang lebih beragam, tanpa harus meninggalkan daerahnya.

Pihaknya yakin, pendidikan dan ekonomi adalah dua pilar utama pembangunan. dengan hadirnya

IAIN dan nantinya universitas islam negeri kampus Baubau, tidak hanya membangun pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan zaman, sekaligus memperkuat basis ekonomi dan daya saing daerah.

Atas nama Pemerintah Kota Baubau, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rektor IAIN Kendari beserta jajaran, serta seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya kampus ini. Mari kita jadikan momentum peresmian ini sebagai awal dari kolaborasi yang lebih erat untuk kemajuan pendidikan dan pembangunan di wilayah kita, ujarnya. (*)

sebelumnya yang juga menolak gugatan serupa.

Majelis hakim menilai Menteri Kesehatan memiliki kewenangan atributif untuk menetapkan anggota Kolegium Kesehatan Indonesia. Proses penetapan juga dinyatakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Permenkes Nomor 12 Tahun 2024.

Hakim menegaskan independensi kolegium tetap terjaga meskipun anggotanya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kolegium tetap memiliki otonomi penuh dalam menjalankan fungsi akademik, termasuk penyusunan standar kompetensi dan kurikulum pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Dengan demikian, Keputusan Menteri Kesehatan tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024-2028 dinyatakan sah dan mengikat.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menyambut baik putusan tersebut.

“Putusan ini menegaskan bahwa langkah Kementerian Kesehatan dalam membentuk Kolegium Kesehatan Indonesia sudah sesuai aturan. Independensi kolegium tetap terjaga, sekaligus memastikan kolaborasi dengan pemerintah berjalan

baik demi peningkatan mutu tenaga medis,” ujar Aji di Jakarta, Kamis (18/9).

Aji menambahkan, Kolegium Kesehatan Indonesia berperan penting dalam menjaga kualitas dokter dan tenaga kesehatan melalui penyusunan standar kompetensi dan kurikulum pendidikan. Karena itu, Kemenkes berkomitmen untuk terus mendukung peran kolegium dalam sistem kesehatan nasional.

“Dengan adanya kepastian hukum ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan dapat lebih fokus memperkuat kerja sama demi peningkatan layanan kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga mengajak organisasi profesi, perguruan tinggi, dan rumah sakit untuk memperkuat sinergi dengan Kolegium Kesehatan Indonesia. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci melahirkan tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing global.

Putusan PTUN Jakarta ini sekaligus menutup polemik hukum terkait keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024-2028. Pemerintah menegaskan akan terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas dalam setiap kebijakan di bidang kesehatan. (*)

Wamenkes Ajak Mahasiswa Kesehatan Jaga Empati dan Semangat Belajar



Laporan: Warman

BOYOLALI-Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan pesan inspiratif kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo (Stikes EU), Boyolali, Jumat (19/9). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya dedikasi, empati, dan semangat belajar bagi calon tenaga kesehatan.

“Saya hadir di sini bukan hanya sebagai Wakil Menteri, tetapi juga sebagai seorang kakak dan ayah bagi adik-adik saya. Perjuangan di bidang kesehatan itu tidak

mudah, tetapi sangat mulia,” ujar Prof. Dante.

Ia mengisahkan pengalamannya saat menempuh pendidikan kedokteran yang penuh tantangan. Menurutnya, masa penuh ujian tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk tenaga kesehatan yang berkualitas sekaligus berempati tinggi kepada pasien. “Empati tidak membuat kalian lemah, empati justru membuat kalian berarti,” ucapnya, disambut tepuk tangan meriah para mahasiswa.

Prof. Dante juga menegaskan bahwa mahasiswa kesehatan tidak hanya dituntut unggul secara akademik, tetapi

juga perlu membangun karakter kuat dan jiwa kemanusiaan.

“Saya yakin dari kampus ini suatu saat akan lahir tokoh-tokoh hebat, bahkan yang lebih hebat dari saya,” ungkapnya.

Menurutnya, peran institusi pendidikan seperti Stikes EU sangat penting dalam mencetak tenaga kesehatan yang unggul, berintegritas, dan bermoral. Ia berharap Stikes EU terus berkembang dan menjadi salah satu institusi pendidikan kesehatan terdepan di Indonesia.

“Mudah-mudahan posisi saya hari ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian yang sedang menempuh pendidikan di Stikes EU,” pungkasnya. (*)

Pengadilan Tinggi Kukuhkan Putusan Menkes Terkait Kolegium

Laporan: Yeti

JAKARTA-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak banding yang diajukan 12 dokter spesialis terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024-2028. Putusan ini menguatkan keputusan PTUN Jakarta



Harian Pagi
Baubau Post
Kritik, Lugas, Independen
Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post
Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna, Hafis, Harman Momi, Firman, Amat Jr

Layouter : Rlirin
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Alasan Eks Kapolres Ngada Dituntut 20 Tahun Bui: Coreng Citra Bangsa



Eks Kapolres Ngada Fajar dituntut 20 tahun penjara di kasus pencabulan anak bawah umur.

Pewartanya: Alwan

JAKARTA- Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang mengungkapkan sederet alasan menuntut Eks Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma Lukman Sumatama 20 tahun penjara dalam kasus kekerasan seksual terhadap tiga anak perempuan.

Menurut JPU, Arwin Adinata tidak ada hal yang bisa meringankan hukuman bagi Fajar. Ia menegaskan Fajar tidak merasa bersalah sehingga tidak memiliki rasa penyesalan atas perbuatannya.

“Perbuatannya terdakwa menimbulkan rasa trauma mendalam bagi anak korban khususnya anak korban IBS (6),” jelas Arwin usai sidang di PN Kupang, Senin (22/9).

Selain itu, jelas Arwin perbuatan terdakwa telah viral di media sosial dan menjadi pemberitaan media nasional dan meresahkan masyarakat khususnya orang tua.

Selain itu, terdakwa juga dituntut akibat telah merusak citra kepolisian di tingkat nasional dan internasional. Sebagai aparat penegak hukum, Fajar sudah membuat tindakan tercela yang beritanya tersebar hingga ke

luar negeri.

“Dia memberi contoh dan perilaku yang buruk dan merusak masa depan anak bangsa, dan mencoreng citra Polri dan merusak citra bangsa di internasional,” kata Arwin.

Dia mengungkapkan dalam dakwaan, jaksa penuntut umum menjerat Fajar dengan pasal berlapis. Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual, dan Pasal 27 serta Pasal 45 Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Selain hukuman 20 tahun, JPU juga menjatuhkan denda sebesar lima miliar rupiah dan diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp359.162.000.

Sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim A. A. GD. Agung Parnata dengan dua hakim anggota yakni Putu Dima Indra dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto.

Berdasarkan pantauan sidang Fajar berlangsung tertutup. Eks Kapolres Ngada, AKBP. Fajar terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap tiga anak yakni IBS (6), WAF (13) dan MAN (16).

Fajar juga diduga terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba karena dari hasil tes urine di Divisi Propam Mabes Polri dinyatakan positif. AKBP. Fajar lalu ditangkap tim gabungan Propam Mabes Polri dan Polda NTT pada 20 Februari 2025 lalu.

Kasus kekerasan seksual tersebut diungkap pertama kali oleh Polisi Federal Australia (AFP) setelah video kekerasan seksual yang dilakukan anak AKBP. Fajar terhadap anak berusia 6 tahun beredar di situs porno asing darkweb.

AFP kemudian melaporkan temuan tersebut ke Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan diteruskan ke Polda NTT.

Dari hasil penyelidikan Ditreskrim Polda NTT juga terungkap kekerasan seksual yang dilakukan AKBP. Fajar terhadap anak berusia 6 tahun terjadi pada 11 Juni 2024 lalu di Hotel Kristal Kupang.

Dan untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak lainnya dilakukan dalam kurun waktu tujuh bulan yakni dari Juni 2024 hingga Januari 2025 di dua Hotel di Kota

Kupang.

Anak berusia 6 tahun itu dibawa oleh perempuan berinisial SHDR alias Stefani alias Fani atau F berusia 20 tahun. F juga menjadi korban kekerasan seksual dari AKBP. Fajar sekaligus menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Perempuan F membawa anak berusia 6 tahun atas permintaan AKBP. Fajar. Anak tersebut lalu mendapat kekerasan seksual. Saat melakukan pencabulan, AKBP. Fajar juga merekam video menggunakan ponselnya dan video tersebut diunggah ke situs porno asing.

Dari jasa membawa anak berusia 6 tahun ke AKBP. Fajar, perempuan F mendapat imbalan sebesar Rp3 juta dari AKBP. Fajar. F pun ditetapkan sebagai tersangka bersama AKBP. Fajar.

Dalam putusan etik oleh Komisi Kode Etik Polri, perwira menengah polri itu dipecat dari dinas kepolisian atau divonis Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH). Atas putusan pemecatan tersebut, AKBP. Fajar kemudian mengajukan banding namun bandingnya ditolak.*

Polwan Briptu Rizka Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir Esco di Lombok

Laporan: Hadi

JAKARTA- Briptu Rizka Sintiyani ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan suaminya Brigadir Esco Faska Relly, anggota Intel Polsek Sekotong, Lombok Barat, NTB.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid mengatakan Bripta Rizka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara pada Jumat (19/9).

“Ya, hasil gelar perkara penyidik menetapkan istrinya menjadi tersangka,” kata Kholid.

Rizka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penahanan Briptu Rizka dibenarkan kuasa hukum keluarga Brigadir Esco, Lalu Anton Hariawan.

“Benar, saya sudah konfirmasi (ke poli-

si), yang bersangkutan (Briptu Rizka Sintiyani) sudah ditahan,” kata Anton, Minggu (21/9).

Briptu Rizka ditahan sejak Sabtu (21/9). Ia tidak ditahan di Polres Lombok Barat, melainkan dititipkan di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda NTB.

“Tadi malam, Sabtu, (21/9) ditahan, sudah dititip di Polda NTB, di Tahti,” sebut Anton.

Brigadir Esco ditemukan tewas mengenaskan di kebun belakang rumahnya, Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, pada 24 Agustus lalu.

Jenazahnya ditemukan oleh sang mertua, Siun, dalam kondisi membusuk, wajah rusak, dan leher terikat tali di bawah pohon.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Briptu Rizka diperiksa intensif terkait kasus tersebut.

Polisi telah melakukan autopsi terhadap jasad Brigadir Esco. Hasilnya menunjukkan dugaan penganiayaan.

“Ada dugaan kekerasan di sana, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ada dugaan itu,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda NTB Kombes Syarif Hidayat pada 29 Agustus lalu.

Menurut Syarif, sebelum ditemukan tewas, Brigadir Esco sempat berdinan ke Polsek Sekotong. Fakta ini diperkuat oleh catatan piket dan daftar kehadiran. “Habis itu, alasannya izin mau besuk orang tuanya sakit,” terang Syarif.*

Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri, Komjen Chryshnanda Jadi Ketua

Laporan: Alwan

JAKARTA- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri. Pembentukan tim ini tertuang dalam Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

Merujuk pada Sprin tersebut, tim itu terdiri dari 52 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri.

Sigit selaku Kapolri Sigit Prabowo bertugas sebagai pelindung dan Wakil Kapolri Komjen Dedi Prasetyo menjadi penasihat dalam tim tersebut.

Kemudian, Kalem-diklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana ditunjuk menjadi ketua tim transformasi reformasi Polri.

Sementara, untuk wakilnya yakni Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak dan Karobindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo.

“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah tanggungjawab dan akuntabilitas,” kata Karo Penmas

Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Senin (22/9).

Disampaikan Trunoyudo, Sprin itu merupakan tindak lanjut dari Polri untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan transformasi institusi sesuai dengan harapan masyarakat.

“Sprin tersebut merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholders terkait melalui pendekatan sistematis untuk mengelola transformasi institusi guna mencapai proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat,” tutur dia.

“Proses dan tujuan mendasar dan luas yang melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah berdasarkan visi strategis (Grand Strategy Polri 2025-2045)” sambungnya.

“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” kata Gomar usai pertemuan.

Presiden Prabowo

Subianto pada pekan lalu juga telah melantik Komjen Polisi Purn Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Ahmad Dofiri dengan demikian akan menjadi penasihat khusus Prabowo dalam kaitan agenda reformasi kepolisian.

Kemudian, Prabowo juga bakal membentuk Komite Reformasi Kepolisian dalam rangka perbaikan dan evaluasi kelembagaan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan susunan Komite Reformasi Kepolisian itu juga tengah disusun oleh pemerintah. Prasetyo tidak mengungkap lebih jauh ihwal susunan anggota Komite itu, ia hanya menyebutkan akan diisi dari berbagai kalangan.

“Tentunya kita semua sangat mencintai institusi Kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi dan itu biasa untuk seluruh institusi,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/9).

Dukung Penerapan Kerja Sosial, Dinkes Tandatangani PKS Dengan Bapas Baubau

Pewarta : Amat Jr

BAUBAU, BP-Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Baubau Baubau menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam upaya mendukung penerapan kerja sosial dalam KUHP Baru sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi klien pemasyarakatan.

Penandatanganan PKS dalam upaya mendukung penerapan kerja sosial dalam KUHP baru ini berlangsung di pondok pesantren Madinatul Qur'an yang dirangkaikan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Rabu (16/09/2025).

Plt Kadis Kesehatan Kota Baubau Fanti Frida Yanti dalam siaran persnya Rabu (17/09/2025) mengungkapkan, Penandatanganan PKS diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antar instansi pemerintah, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi klien pemasyarakatan dan masyarakat Kota Baubau, khususnya proses reintegrasi sosial dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat klien pemasyarakatan. "Saya sangat mendukung



pemberian kerja sosial tersebut sebagai bagian menjadikan klien pemasyarakatan sehat secara menyeluruh baik fisik, mental dan social," ujarnya.

Ditambahkannya, komitmen bersama untuk kesejahteraan masyarakat antara Bapas Kelas II Baubau dengan Dinas Kesehatan Kota Baubau adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Baubau dalam memberikan pelayanan publik yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. "Kami siap mendukung BAPAS Baubau

dalam memberikan layanan kesehatan yang profesional dan sesuai standar". Ini adalah wujud nyata dari Kerja Bersama yang menjadi semangat dan komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau dalam memberikan pelayanan publik untuk semua," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bapas Kelas II Baubau Nasirudin menyatakan, PKS ini akan memudahkan klien pemasyarakatan yang menjalani pidana kerja sosial sekaligus mendapatkan hak dasar mereka, yaitu akses

terhadap layanan kesehatan yang layak. Perjanjian ini mencakup dukungan terhadap pidana kerja sosial, pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan dan edukasi kesehatan.

Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Bapas Kelas II Baubau dengan Dinas Kesehatan Kota Baubau berjalan lancar. Selanjutnya, menunggu jadwal implementasi bersama, sekaligus melaksanakan CKG di BAPAS bersama Dharma Wanita BAPAS Kelas II Kota Baubau. (*)

Rustini Muhaimin, Istri Cak Imin Datang ke Baubau untuk Sejumlah Agenda Seperti Baksos dan Berkunjung ke Benteng Keraton Buton



Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Istri Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yang juga ketua umum PKB yakni Rustini Muhaimin melakukan blusukan di Kota Baubau pada Sabtu (13/09/2025).

Kedatangan Rustini Muhaimin di Baubau melalui bandara betoambari Baubau disambut langsung Pj Sekda Kota Baubau Drs Meizat Amril Tamim, M.Si didampingi anggota DPR RI Komisi IV asal Sultra Jaelani S.IP, M.Si yang sudah beberapa hari berada di Baubau serta beberapa kepala OPD lingkup Pemkot Baubau dan beberapa pengurus PKB Sultra.

Dalam keterangan persnya, anggota DPR RI Jaelani, S.IP, M.Si mengungkapkan, kehadiran Rustini Muhaimin di Kota Baubau, selain menghadiri pendidikan kader perempuan bangsa, juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial yang akan dilaksanakan pada Minggu pagi (14/09/2025) di kantor Wali kota baubau. Adapun teknis pelaksanaannya, terdiri dari 25 penyandang disabilitas, 35 Lansia serta 40 dari UMKM.

Menurut Jaelani, sebelum melaksanakan kegiatan, Rus-

tini Muhaimin akan berkunjung ke keraton Buton dengan tujuan untuk memahami kebudayaan di Kesultanan Buton serta berziarah ke makam-makam yang ada di Kesultanan Buton. "Pada prinsipnya, tatanan sosial kita sekarang lagi tidak baik-baik saja, Oleh karena itu, dengan kehadiran bu Rustini dan rombongan adalah untuk memberikan kontribusi positif dalam hal saling membagi dan saling menguatkan. Semoga dengan bantuan paket sembako ala kadarnya ini dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan serta dapat berkelanjutan," ungkapnya.

Ditambahkan, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan Wali Kota Baubau terkait beberapa titik untuk gerakan pasar murah. dan ini merupakan komitmennya sebagai perwakilan Sulawesi Tenggara serta berharap agar saling menguatkan dalam pemberdayaan masyarakat, sebagai fokus Wali Kota Baubau untuk mendongkrak UMKM.

Dijelaskan Jaelani, istri Cak Imin Rustini Muhaimin yang akan berada di Baubau selama dua hari akan didampingi beberapa anggota DPR RI dalam kegiatan sosialisasi Makan Bergizi Gratis yang rencananya akan dilakukan di vila nirwana pada Sabtu (Minggu, 14/09/2025). (*)

Rustini Muhaimin Beri Sembako, Selimut, Handuk dan Uang Transport untuk Warga Miskin, Difabel dan Lansia di Baubau



Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Dalam kegiatan yang dilakukan di Kota Baubau pada Minggu

(14/09/2025), istri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Rustini

Murtadho menyerahkan langsung bantuan sebanyak 100 orang dengan paket bantuan itu berupa sembako yakni beras, kemu-

dian minyak, gula, dan telur ditambah dengan selimut, handuk dan uang transport masing-masing 100 ribu rupiah, itu dibagikan

langsung oleh Ibu Rustini Muhaimin Iskandar.

Demikian dikatakan Kadis Sosial Kota Baubau Hanarudin, S.Sos, M.Si dalam keterangan persnya Minggu (14/09/2025).

Menurut Hanarudin, bantuan yang diberikan tersebut sasarannya 40 orang perwakilan UMKM, melalui Kadis Koperasi

dan UMKM Kota Baubau. Kemudian juga untuk bantuan sosial itu di sasar 25 orang dari difabel dan 35 orang untuk Lansia, miskin dan Lansia.

Kadis Sosial Kota Baubau berharap, khususnya kepada Jaelani, S.IP, M.Si anggota DPR RI tetap akan ada perhatian ke depannya dan utamanya kepada masyara-

kat Kota Baubau dan UMKM secara khusus bisa berkembang lebih baik lagi.

Sementara itu, kunjungan Rustini Muhaimin Iskandar di Baubau juga turut dihadiri Ratna Juwita Komisi IX DPR RI dan juga yang terkhusus Bapak Jaelani, S.IP, M.Si anggota DPR RI Komisi IV Perwakilan Prov Sulawesi Tenggara. (*)